

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang terus meningkat merupakan salah satu tujuan utama suatu negara. Sebagai salah satu tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan UUD 1945 tentang tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara (Halim, dkk 2022). Menurut (Sijabat, 2022) Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mendorong pemerintah suatu negara atau wilayah untuk melakukan investasi yang lebih baik di bidang Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia lainnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang dihitung dalam IPM diantaranya yaitu indikator Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Menurut (Ariansyah, 2018), indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu tolak ukur dalam melihat pembangunan dan peningkatan modal manusia.

Menurut UNDP (1990), HDI (*Human Development Index*) atau biasa disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai proses dalam memperluaspilihan seseorang dengan cara tertentu, yang memungkinkan seseorang untuk hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih berpengetahuan. Terdapat

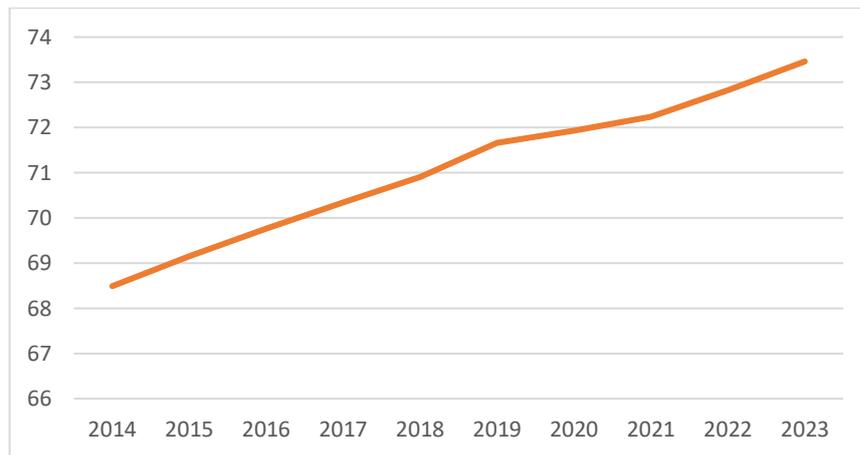
tiga aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh pendapatan yang digunakan dalam mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah. Kesehatan yang baik akan membuat seseorang lebih produktif, namun saat produktivitas yang rendah tentu pendapatan yang dihasilkan juga rendah. Dengan pendapatan yang rendah masyarakat akan kesulitan dalam mengakses Pendidikan dan Kesehatan karena adanya kendala biaya. Hal ini dapat membuat kualitas sumber daya manusia jadi menurun.

Menurut (Aulia, dkk, 2023) alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap Pendidikan dan Kesehatan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Manusia bukan hanya semata-mata menjadi tujuan ataupun alat pembangunan. Sekarang ini sumber daya manusia menjadi prioritas dalam hal pembangunan (Lumi, dkk, 2022). Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan Pembangunan nasional. Kualitas manusia dalam suatu wilayah memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan Pembangunan di wilayahnya, karena indeks Pembangunan manusia mengukur seberapa jauh tingkat kesejahteraan suatu wilayah dalam Pembangunan daerah. Keberhasilan Pembangunan manusia tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial (Mirza, 2012). Indeks Pembangunan Manusia digunakan

untuk menilai dampak kebijakan pemerintah dalam realokasi anggaran belanja pada fungsi Pendidikan dan Kesehatan. IPM sebagai indeks yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat baik dari sektor ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Perkembangan IPM di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2023

### **Gambar 1.1 Perkembangan IPM Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2023, dimana pada tahun 2015 sebesar 69,15% dan terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 73,46%. Meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengalami peningkatan pada kurun waktu tersebut. Hal ini berarti kualitas kesejahteraan masyarakat dalam beberapa aspek turut mengalami peningkatan.

Pembangunan manusia bersifat jangka panjang, sehingga pertumbuhan IPM tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu, indikator pembentuk IPM bukan hanya dilihat dari pembangunan manusia. Namun dilihat dari beberapa

indikator masih mengalami peningkatan sehingga pada saat Covid-19, Kab/Kota di Sulawesi Selatan tetap mengalami peningkatan meskipun lambat dari tahun sebelumnya.

Menurut Mankiw (2006), Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan pada modal manusia yang terdiri dari Pendidikan dan Kesehatan. Dengan perbaikan modal manusia dalam Pendidikan dan Kesehatan diharapkan bisa memperluas kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Modal manusia yang dianggap sebagai suatu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produktivitas tenaga kerja yang meningkat dapat mempengaruhi standar hidup seseorang. Tingkat Pendidikan yang tinggi dapat membantu dalam alokasi sumber daya manusia dan mendukung dalam penyerapan teknologi (Aljarallah, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang dibangun atas dasar *human capital*, maka dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat secara merata. Kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari tingkat ekonomi saja, namun dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan kualitas Kesehatan (Abdullah, 2014).

Pembangunan suatu wilayah membutuhkan kontribusi yang besar dari pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sebagai bentuk tindakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengarahkan perekonomian menuju transformasi ekonomi seperti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pengurangan pengangguran, keseimbangan eksternal, serta redistribusi pendapatan (Babalola, 2015). Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencapai pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terutama dalam kinerja pertumbuhan jangka panjang yang baik, pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan pada fungsi tertentu dapat menciptakan *multiplier* ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi pemerintah dalam alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 33 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan dalam bentuk belanja menurut fungsi yang terdiri dari Sembilan fungsi yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, Kesehatan, pariwisata dan budaya, Pendidikan dan perlindungan sosial

Dalam mendukung proses pembangunan suatu wilayah terutama dalam aspek Pendidikan dan Kesehatan dibutuhkan suatu alokasi anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya pengalokasian anggaran dalam aspek tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB perkapita serta pembangunan ekonomi yang terdapat pada Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi APBD pada aspek Pendidikan dan Kesehatan pada provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Fungsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**

Tahun	Realisasi APBD Menurut Fungsi Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)	
	Pendidikan	Kesehatan
2014	1.559.334.203.058	654.045.290.793
2015	1.870.871.072.622	686.873.969.184
2016	107.924.656.224	328.229.581.467
2017	3.868.223.675.733	614.157.546.285
2018	3.949.948.846.038	675.874.762.015
2019	3.968.671.385.286	810.807.943.725
2020	4.112.630.085.641	991.172.406.433
2021	2.907.973.605.923	729.005.456.827
2022	2.946.997.130.129	804.017.888.497
2023	3.254.249.123.431	827.044.775.950

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2023

Besarnya Peran pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar pengalokasian anggaran yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Alokasi anggaran yang semakin besar menunjukkan bahwa pembangunan di suatu wilayah juga semakin meningkat. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan IPM yaitu dengan meningkatkan daya beli (konsumsi). Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan membuat nilai IPM juga meningkat.

Realisasi APBD pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016, alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017-2020. Di tahun selanjutnya anggaran bidang Pendidikan dan Kesehatan kembali turun. Ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman mengenai jenis dan standar minimum dari layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak untuk diterima oleh setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengatur bahwa layanan pendidikan wajib mencakup pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ditujukan untuk memastikan bahwa tersedianya akses dan layanan Pendidikan untuk semua kalangan dengan penyediaan fasilitas Pendidikan dan tenaga pendidik di setiap kabupaten/kota. Dalam bidang Kesehatan penerapan SPM meliputi layanan Kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, anak balita, serta penanggulangan penyakit menular. Pemerintah provinsi telah melakukan kinerja yang maksimal terutama dalam akses layanan Kesehatan untuk masyarakat di daerah terpencil.

Belanja modal sebagai salah satu indikator penting dalam pembentukan IPM baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi melalui belanja modal memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena infrastruktur yang dibangun melalui alokasi tersebut akan mempercepat aktivitas perekonomian. Hal tersebut memungkinkan distribusi barang dan jasa berlangsung dengan lebih efisien dan efektif.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal terdiri dari: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal lainnya, dan (6) belanja modal layanan umum (BLU). Saat rasio belanja modal semakin tinggi, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin baik. Sebaliknya, saat rasio belanja modal rendah, maka pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi semakin buruk. Menurut Todaro (2003) akumulasi modal terjadi saat sebagai dari

nilai pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi pemerintah daerah berupa pengalokasian dana untuk proyek Pembangunan sebagai sarana dan prasarana umum yang diakumulasikan kedalam belanja modal pemerintah.

**Tabel 1.2 Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2023 (dalam Milyar Rupiah)</b>
2014	676,24
2015	849,31
2016	856,86
2017	1051,19
2018	1081,81
2019	969,49
2020	1195,02
2021	1459,72
2022	1100,87
2023	951,16

*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2023*

Realisasi anggaran belanja modal di Sulawesi selatan periode tahun 2014-2023 cenderung berfluktuasi. Kondisi ini sebabkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi. Pada tahun 2020-2023 pandemi covid-19 melanda yang menyebabkan alokasi anggaran bergeser ke penanganan Kesehatan dan bantuan sosial, sehingga belanja modal menurun.

PDRB juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi IPM. Pada dasarnya PDRB sebagai bentuk jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

Dalam perhitungan PDRB dilakukan dengan dua penilaian yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku umumnya digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. (BPS, 2023)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan produktivitas perekonomian sehingga pendapatan juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan perkapita merupakan bentuk cerminan dari adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**

Tahun	PDRB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sulawesi Selatan (dalam Milyaran Rupiah)
2014	233988,05
2015	250802,99
2016	269401,31
2017	288814,17
2018	309156,19
2019	330506,38
2020	328154,57
2021	343395,41
2022	360895,02
2023	377076,16

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2023

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB sebelum Covid-19 terus meningkat tiap tahun yaitu pada tahun 2014-2019. Pada tahun 2020, perkembangan PDRB di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Namun, ditahun selanjutnya perkembangan PDRB di Sulawesi Selatan berdasarkan data tersebut kembali mengalami kenaikan. Hal ini berarti pandemi Covid-19 tidak terlalu memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Sulawesi Selatan.

Pengeluaran per kapita sebagai indikator untuk mengukur standar hidup manusia. Pengeluaran per kapita sebagai bentuk gambaran tingkat daya beli (*purchasing power parity*) dan merupakan salah satu komponen untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. (Muda, R Dkk 2019). Daya beli masyarakat merupakan bentuk kemampuan masyarakat sebagai seorang konsumen dalam melakukan pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan. Standar hidup yang layak menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat sebagai bentuk dampak dari membaiknya perekonomian suatu wilayah.

**Tabel 1.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu/Rupiah/Orang/Tahun) Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu/Rupiah/Orang/Tahun)</b>
2014	9723
2015	9992
2016	10281
2017	10489
2018	10814
2019	11118
2020	11079
2021	11184
2022	11430
2023	11841

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2023

Pengeluaran per kapita di Sulawesi Selatan selama periode 2014-2019 cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan dan daya beli masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dalam peningkatan pengeluaran per kapita yang tercantum pada tabel di atas. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda yang tentu membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. Penurunan permintaan akan tenaga kerja mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut membuat masyarakat membatasi dalam hal konsumsi dan pengeluaran.

Tingkat kemiskinan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan merupakan salah satu aspek untuk melihat kualitas hidup manusia yaitu standar hidup yang layak. Menurut Todaro (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. IPM yang rendah akan menyebabkan produktivitas penduduk menjadi berkurang. Rendahnya produktivitas penduduk akan mengakibatkan rendahnya pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Penurunan angka sumber daya manusia disebabkan oleh faktor kemiskinan yang dapat menghambat tingkat Pendidikan seseorang dan akan mempengaruhi kelayakan dalam tingkat Kesehatan. Aspek yang paling mendasar dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah dengan menurunkan angka kemiskinan suatu daerah. Saat angka kemiskinan suatu wilayah semakin tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. (Saputro, 2022).

Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka orang tersebut akan memiliki kemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendidikan di suatu daerah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. (Imran, 2019).

**Tabel 1.5 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan (persen)
2014	9,54
2015	9,39
2016	9,4
2017	9,38
2018	9,06
2019	8,69
2020	8,72
2021	8,78
2022	8,63
2023	8,7

*Sumber: BPS Sulawesi Selatan 2023*

Persentase kemiskinan selama 10 tahun terakhir di Sulawesi Selatan berfluktuatif setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,54%. Proporsi penduduk miskin yang terus mengalami naik turun secara tidak stabil dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Saat persentasi penduduk miskin berkurang membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan cukup efektif. Yang dimana saat kemiskinan berkurang maka kesejahteraan Masyarakat akan meningkat.

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka sebagai indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Sukirno (2006)

pengangguran berdasarkan jam kerja dapat digolongkan antara lain pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terbuka terhadap 100 penduduk yang masuk dalam kategori Angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka sangat erat kaitannya dengan kualitas pembangunan manusia karena saat jumlah pengangguran tinggi maka akan mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) pengangguran terbuka didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang dalam Angkatan kerja sedang mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan awal yang layak, atau belum pernah bekerja. (Mutia, Dkk 2023).

**Tabel 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023 (dalam persen %)
2014	5,08
2015	5,95
2016	4,8
2017	5,61
2018	5,34
2019	4,62
2020	6,31
2021	5,72
2022	4,51
2023	4,33

*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2023*

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2014-2023 pada tabel diatas menunjukkan bahwa tiap tahun mengalami fluktuasi pada periode tersebut. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sulawesi Selatan

terjadi pada tahun 2020. Pada tahun tersebut terdapat pandemi covid-19 yang mempengaruhi pasar tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap kualitas sumber daya manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan terkait kebijakan pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2014-2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?
2. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor Kesehatan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?
4. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?
5. Apakah pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?

6. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?
7. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?
8. Apakah terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia sebelum dan sesudah adanya covid-19 di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran per kapita terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.

7. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.
8. Untuk mengetahui perbedaan kualitas sumber daya manusia sebelum dan sesudah adanya covid-19 di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2014-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi:

1. Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan Keputusan terutama dalam Pembangunan daerah yang lebih merata.

2. Kepentingan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan memahami tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Teori Human Capital

*Human capital* terdiri dari dua kata dasar yaitu manusia dan kapital. Yang Dimana kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa yang tanpa mengonsumsinya selama dalam proses produksi. Menurut Goode (1959) *human capital* atau modal manusia dapat juga didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, bakat, dan sifat-sifat yang diperoleh yang berkontribusi terhadap produksi. Keterampilan mewakili kapasitas individu yang berkontribusi terhadap produksi sebagai argument dalam fungsi produksi Bowles, Gintis, dan Osborne (2001). Menurut Blundell, Dearden, Meghir, dan Sianesi (1999), terdapat dua komponen utama sumber daya manusia yang mempunyai kekuatan yang kuat dan saling melengkapi yaitu kemampuan awal (baik yang diperoleh atau bawaan) dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan di tempat kerja.

Teori modal manusia dalam perekonomian yang diterapkan pertama kali oleh Becker dan Mincer dari *Chicago school*. Dalam pendekatan aslinya, Becker (1964) mengembangkan model investasi individu pada modal manusia. Menurut Becker (1962), investasi pada sumber daya manusia berarti semua aktivitas yang mempengaruhi pendapatan riil di masa depan melalui sumber daya pada manusia. Investasi modal manusia adalah pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, informasi, dan mobilitas tenaga kerja, Weisbrod (1966).

Teori *human capital* seiring perkembangannya terbagi menjadi tiga konsep. Konsep pertama yaitu *human capital* sebagai suatu kemampuan yang dimiliki pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rastogi (2002) menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Konsep yang kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. (Nurkholis, 2018) Konsep yang ketiga menyatakan bahwa *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Menurut Romer (1999) *human capital* merupakan sumber yang mendasar dari produktifitas ekonomi. Rosen (1999) menyatakan bahwa *human capital* juga sebuah investasi yang dilakukan manusia dalam meningkatkan produktifitasnya. *Human capital* merupakan perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang mempengaruhi produktifitas manusia (Frank & Bemanke, 2007).

Dalam teori *human capital* menekankan bahwa investasi pada manusia, seperti dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur. Belanja modal khususnya pada infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan akan menciptakan fasilitas yang lebih baik yang akan mendukung pengembangan kompetensi dan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan fiskal melalui belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta dapat menciptakan SDM yang berkualitas yang akan menjadi pendorong utama dalam Pembangunan jangka panjang.

Menurut Todaro & Smith (2012) kesehatan dan pendidikan dalam fungsi produksi nasional memiliki peran sebagai komponen modal manusia. Peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan penting dalam pembangunan.

kesehatan dan pendidikan mempunyai keterkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Jika modal kesehatan lebih besar akan meningkatkan laba investasi di bidang pendidikan karena kesehatan sebagai faktor penting dalam kehadiran seseorang dalam proses belajar formal. Saat seseorang berumur panjang dapat meningkatkan keuntungan dalam berinvestasi di bidang pendidikan. Kesehatan yang baik akan menurunkan Tingkat depresiasi dalam modal Pendidikan. Di sisi lain, saat modal pendidikan lebih besar maka dapat meningkatkan laba atas investasi di bidang kesehatan, karena adanya program kesehatan yang mengandalkan keterampilan dasar yang sering dipelajari di sekolah, termasuk dalam hal kebersihan dan sanitasi pribadi, dalam kemampuan membaca dan berhitung, Pendidikan juga diperlukan dalam pembentukan dan pelatihan tenaga kesehatan. Selain itu, peningkatan efisiensi produktif dari investasi di bidang Pendidikan akan meningkatkan keuntungan dari investasi yang menyelamatkan nyawa di bidang Kesehatan.

### **2.1.2 Teori Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka melaksanakan pembangunan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal melalui kebijakan pengeluaran maupun belanja

pemerintah. Dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. (Azwar, 2016). Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Menurut sadono sukirno (2003), kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Kebijakan fiskal sebagai suatu bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Terdapat dua prioritas dalam kebijakan fiskal yaitu mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi saat penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua dalam mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/pengangguran dan saldo neraca pembayaran.

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Badan Pusat Statistik telah menggantu beberapa indikator dari IPM dalah melakukan perhitungan IPM yaitu Angka Melek Huruf diganti menjadi Angka Haapan Lama Sekolah, PDRB per kapita diganti menjadi Produk Nasiona Bruto (PNB) per kapita. IPM berperan sebagai indikator yang sekaligus sebagai alat ukur pencapaian kualitas hidup Masyarakat. (Saputro, M.H. 2022).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi yaitu umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*). Umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Terdapat 3 golongan status dalam pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM yaitu:

1.  $IPM < 50$  dikatakan rendah
2.  $50 \leq IPM < 80$  dikatakan sedang atau menengah
3.  $IPM \geq 80$  dikatakan tinggi

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi suatu negara dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (Susanti & Hidayat, 2020). Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dibutuhkan dana yang besar. Pengeluaran pemerintah sebagai kombinasi produk yang dihasilkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pengadaan dan pemeliharaan barang

publik, biaya pelaksanaan jasa publik, dan pelayanan administratif (Mongan, 2019).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002).

Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti model pembangunan tentang perkembangan pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dan teori Adolf Wagner.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pemerintah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya pembangunan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Pada tingkat selanjutnya, Rostow berpendapat bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti dari Teori Adolf Wagner adalah semakin meningkat peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa suatu perekonomian yang apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan timbal balik dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

#### **2.1.5 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Pembelanjaan modal dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dikategorikan sebagai belanja langsung yang digunakan dalam membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Belanja modal bertujuan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau dapat juga dengan membeli. (Christy, F.A., & Priyo, H.A. 2009)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, jenis-jenis belanja modal yaitu: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, serta Belanja Modal Badan Layanan Umum.

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Penambahan aset tetap pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya kedalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Pengadaan aset tetap biasanya dilakukan pemerintah daerah setiap tahun sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang akan memberikan dampak jangka Panjang.

#### **2.1.6 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau bisa disebut jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2016).

Menurut BPS ada tiga pendekatan dalam perhitungan angka-angka PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendekatan produksi oleh BPS dihitung dengan penjumlahan nilai tambah dari seluruh lapangan usaha, sedangkan untuk

pengeluaran dihitung dengan penjumlahan seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri atas pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan net ekspor antar daerah.

PDRB dapat dilihat secara total maupun perkapita. PDRB perkapita adalah jumlah PDRB yang dibagi dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita sebagai salah satu indikator dalam menentukan dimensi pembangunan manusia. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup di suatu wilayah lebih layak karena pendapatan penduduknya rata-rata tinggi sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi (Ariansyah, 2018).

### **2.1.7 Pengeluaran per Kapita**

Pendapatan masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Menurut Keynes, saat seseorang mendapatkan tambahan pendapatan, maka konsumsi juga akan bertambah namun besarnya tambahan konsumsi tidak sebesar tambahan pendapatan. Kenaikan pendapatan didasarkan pada besarnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula jumlah pengeluarannya. Kenaikan pendapatan didasarkan pada besarnya Marginal Propensity to consume (MPC). MPC ini merupakan presentase dari pendapatan yang digunakan untuk berkonsumsi (Nizar. F., Muhammad. A 2023).

Menurut (Samuelson, 1999) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposibel sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan menurut daur hidup, kekayaan serta faktor permanen lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

### **2.1.8 Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut UNDP kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi, namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses dalam Pendidikan, Kesehatan.

Kemiskinan menjadi masalah yang cukup serius dalam pembangunan manusia karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli Masyarakat yang dimana tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain seperti Pendidikan dan Kesehatan pun juga ikut terabaikan. (Mirza, 2012)

Menurut Subandi (2012) salah satu strategi yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM dilakukan dengan melakukan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (Pendidikan, Kesehatan dan gizi) yang merupakan strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan manusia juga selaras dengan pembangunan yang merata. Dengan pembangunan yang merata diharapkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masalah pembangunan, dan akan menekan masalah kemiskinan sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat. (Amelinda, D.V & Lucky, R. 2022)

### **2.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Dalam teori klasik, menyatakan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (*supply*) (Gilarso, 2004). Teori klasik mengasumsikan bahwa penawaran agregat, modal, tenaga kerja dan teknologi yang menentukan pendapatan nasional.

Teori Keynes tentang pengangguran, menyatakan bahwa permintaan agregat yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi terhambat bukan disebabkan karena rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal tersebut tidak dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Saat tenaga kerja meningkat, upah akan turun yang akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah menunjukkan adanya penurunan daya beli Masyarakat terhadap barang-barang. Dalam jangka pendek permasalahan pengangguran dapat diatasi dengan adanya keterlibatan pemerintah melalui sebuah kebijakan.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Aulia, dkk (2023).

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas Masyarakat. Pengeluaran pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan Pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, dalam Kahang, 2016). Realisasi anggaran pendidikan tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kahang, dkk (2016).

### **2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Indeks pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan serta perlindungan sosial. Menurut Rostow dalam model pembangunan, aktivitas sosial berupa program

kesejahteraan beserta program pelayanan Kesehatan. (Mangkoesoebroto, 2001). Indikator Kesehatan merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan kesehatan menjadi kunci keberhasilan pada kualitas hidup Masyarakat dalam pembangunan suatu negara. Kualitas hidup sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dibuat pemerintah yang dapat meningkatkan derajat Kesehatan hidup Masyarakat. Wardhana, A., Kharisma, B., dan Sulandari, DS. (2021).

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek Kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Aulia, dkk (2023).

Menurut Mahuze, dkk (2022), pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Todaro dan Smith (2003) menyatakan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

### **2.2.3 Belanja Modal dengan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Todaro & Smith tidak selamanya kesejahteraan Masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan

manusia yang tercermin dalam IPM sangat dipengaruhi oleh akses dan kualitas layanan pada Pendidikan dan Kesehatan. Pengeluaran modal pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan infrastruktur baik dalam sektor Pendidikan maupun Kesehatan yang dapat mengurangi masalah ketimpangan dan akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Belanja modal dan IPM berkaitan erat dimana saat kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yang didasarkan pada pemikiran bahwa Pendidikan tidak hanya sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun Pendidikan lebih dari itu karena Pendidikan merupakan salah satu Upaya Pembangunan untuk membangun watak bangsa seperti halnya dalam kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan keteladanan. (Mirza, 2011)

Pengeluaran modal pada sektor Pendidikan, seperti Pembangunan sekolah baru, laboratorium, maupun fasilitas belajar yang lebih baik akan meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi IPM, karena salah satu indikator pembentuk IPM yaitu Pendidikan yang mencakup harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam kontribusinya untuk Pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang. Pada sektor Kesehatan, belanja modal dalam Pembangunan rumah sakit, klinik, dan penyediaan alat medis yang lebih memadai akan memperbaiki akses Masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang lebih berkualitas. Peningkatan kualitas infrastruktur Kesehatan akan berkontribusi dalam meningkatkan harapan hidup seseorang. Dengan pengalokasian anggaran yang efisien diberbagai sektor akan memberi pengaruh terhadap peningkatan IPM suatu wilayah.

#### 2.2.4 PDRB dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek pembangunan manusia, dimana dengan modal manusia yang berkualitas akan menciptakan kinerja ekonomi yang lebih baik. PDRB sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dengan pembangunan ekonomi yang baik maka produktivitas dan pendapatan akan meningkat melalui kesempatan kerja yang disediakan. (Si'lang dkk, 2019)

Secara logika saat PDRB naik, maka tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik, saat *income* naik tentu konsumsi juga akan ikut meningkat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Semakin Sejahtera suatu wilayah, membuktikan bahwa wilayah tersebut memiliki akses yang lebih mudah terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan standar hidup layak. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan menentukan kemampuan Masyarakat dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun dengan kelembagaan sebagai suatu sarana penting dalam mencapai suatu pertumbuhan ekonomi (Ramirez dalam Nyoman, 2014).

Menurut Sania dkk (2021), pertumbuhan output yang tinggi akan mengakibatkan konsumsi Masyarakat meningkat. Hal ini akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat menjadi tinggi dan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia karena daya beli menjadi salah satu indikator pembentuk IPM dari segi pendapatan.

### **2.2.5 Pengeluaran per Kapita dengan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Adelman dan Morris (dalam Arsyad 2010), pengeluaran merupakan kegiatan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan membuat pengeluaran juga tinggi. Saat pendapatan menurun, maka rumah tangga akan mengurangi konsumsinya. Maka, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pendapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan tingkat kesejahteraan. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan IPM. (dalam Akbar. A. Dkk 2023).

Pendapatan masyarakat sebagai faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Saat pendapatan naik maka tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat akan meningkat (Ibrahim, 2016 dalam Akbar, 2023).

Daya beli masyarakat yang tinggi menggambarkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat tersebut, yang membuktikan bahwa tingginya pengeluaran per kapita suatu masyarakat menunjukkan pembangunan manusia yang baik atau dengan kata lain pembangunan manusia ikut meningkat. Indikator penyebab pengeluaran per kapita meningkat yaitu dengan melihat indikator tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Akbar. A Dkk 2023).

### **2.2.6 Tingkat Kemiskinan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kemiskinan dapat berdampak cukup serius terhadap pembangunan manusia. Kemiskinan akan membuat tingkat kemakmuran masyarakat menjadi tidak stabil. Sejalan dengan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi maka akan menghambat dalam pemcapaian

pembangunan ekonomi. Saat pendapatan masyarakat berkurang maka daya beli masyarakat akan menurun, sehingga Pendidikan dan Kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar dalam meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak akan mencapai standar hidup yang layak, sehingga kesejahteraannya juga tidak dapat terpenuhi. (Trisno. T.U Dkk, 2022).

Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak memiliki alokasi dana dalam memenuhi kebutuhan dasar yang salah satunya berhubungan dengan proses pembangunan manusia. Sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar, atau kesulitan dalam mengakses fasilitas Pendidikan dan pekerjaan yang dimana akan mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia. Pada dasarnya semakin rendahnya kualitas sumber daya manusia akan sangat berpotensi menjadi beban dalam pembangunan suatu wilayah. (Laode. M Dkk, 2020).

### **2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Todaro (2000) pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern dalam mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Bertambahnya tingkat pengangguran terbuka akan menyebabkan jumlah penduduk yang memiliki pendapatan akan berkurang, maka akses terhadap standar hidup layak, Pendidikan dan kemiskinan akan berkurang. Maka untuk mengurangi pengangguran diperlukan adanya peran pemerintah dalam

membentuk sebuah kebijakan. Dengan teratasinya pengangguran akan berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Saat pendapatan Masyarakat meningkat, akses dalam berbagai bidang dapat terpenuhi yang akan meningkatkan standar hidup yang layak.

### **2.3 Studi Empiris**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan perbandingan bagi penulis yang memiliki korelasi dengan topik penelitian penulis.

Mongan, Jehuda (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 32 provinsi selama periode tujuh tahun 2000-2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pusat bidang Pendidikan dari PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Belanja pemerintah pusat bidang Kesehatan dari PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Belanja pemerintah daerah bidang Pendidikan dari PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Belanja pemerintah daerah bidang Kesehatan dari PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Susanti, E., & Hidayat, N. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan

pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Andiny, P., & Sari, M. (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Bakar, Abu (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda semi log. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mimika.

Lumi, dkk (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif.

Siregar, dkk (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

Aulia, dkk (2023) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Mataram pada tahun 2012-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk kurun waktu (*time series*) tahunan mulai dari tahun 2012-2021 yang bersifat kuantitatif. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis linier berganda, uji koefisien regresi parsial (uji t), uji signifikan simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Mataram tahun 2012-2021. Pendapatan per kapita secara parsial menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Mataram selama periode tahun 2012-2021. Secara simultan pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Mataram periode tahun 2012-2021.

Ariansyah (2018) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan domestik regional bruto di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*) Model *Trimming*. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran fungsi ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut mempengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda Dimana fungsi ekonomi dan Pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, sedangkan fungsi Kesehatan mempengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB.

Sanggalorang, dkk (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi utara. Sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi utara.

Mahuze, dkk (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Boven Digoel. Model analisis yang

digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Boven Digoel. Namun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Maryozi, dkk (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan teknik analisis kuadrat terkecil sederhana *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan belanja Pendidikan, belanja Kesehatan, dan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Mailassa'adah, dkk (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kalimantan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif dan signifikan pada semua sektor khususnya pada belanja pemerintah sektor Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling berpengaruh.

Damanik, dkk (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja pemerintah bidang Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Simalungun secara parsial dan simultan.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Sania, dkk (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka dan UMR terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen produk domestik regional bruto dan upah minimum regional berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Naibaho, M., & Nabila, U., (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Langkat. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Langkat.

Si'lang, dkk (2019) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan PDRB pada sektor pertanian, belanja langsung pemerintah, investasi swasta dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Muliza, dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja Pendidikan, belanja Kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di

Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan *random effect model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.

Nuriyah, dkk (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro.

Izzah, C.I & Ignatia M.H (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat upah, dan produk domestik bruto terhadap indeks Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yang bersifat kuantitatif dalam kurun waktu 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia. Sedangkan secara simultan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Nurhab, M.I., (2022) melakukan penelitian tentang analisis tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di kota Metro. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis yang

digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM, dan secara simultan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran juga tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

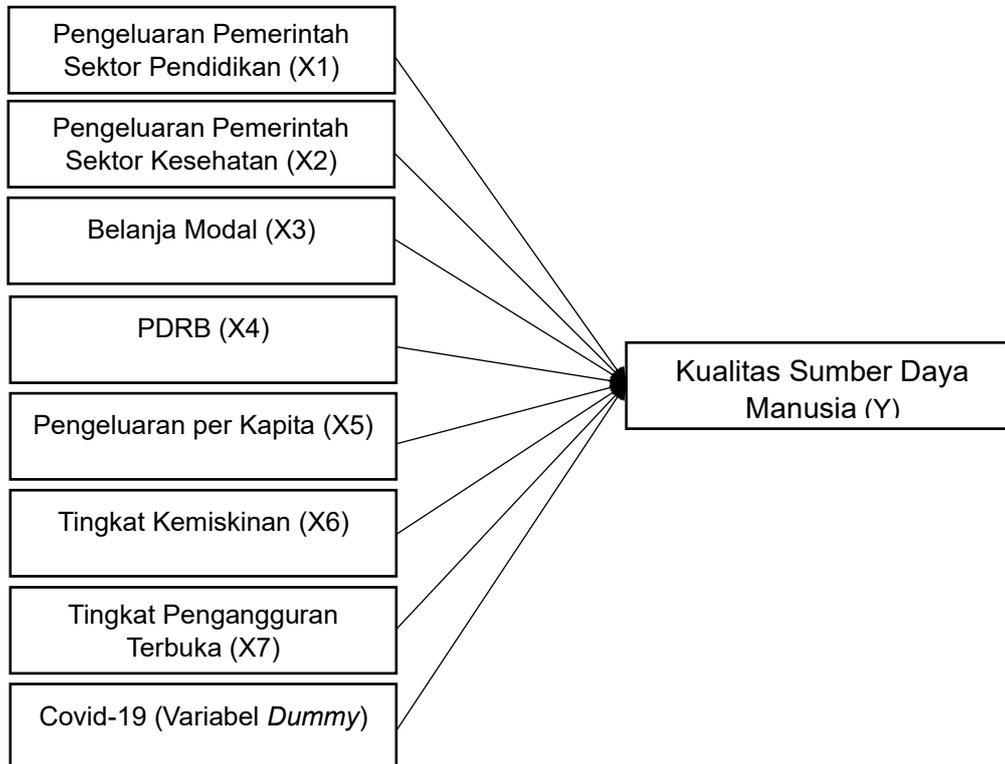
Akbar, A Dkk (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran per kapita terhadap IPM di Pulau Sumatera. Metode yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran per kapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera.

Saputro, N.R & Banu, W (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh dana perimbangan, belanja modal, Pendidikan dan teknologi terhadap IPM. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, Pendidikan dan teknologi berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.

Mirza, D.S (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap IPM di Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

## 2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian literatur, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikiran**

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (variabel independen) yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2), Belanja Modal (X3) dan variabel terikat (variabel dependen) yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel tersebut merupakan variabel penting untuk melihat pengaruh kebijakan fiskal terhadap kualitas sumber daya manusia. Selain variabel bebas, penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu PDRB (X4), Pengeluaran per Kapita (X5), Tingkat kemiskinan (X6) dan Tingkat pengangguran terbuka (X7). Variabel kontrol menurut Sugiyono (2017) adalah suatu variabel yang

dikendalikan atau dibuat secara konstan sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Andiny & Sari, (2018). Investasi pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur melalui belanja modal dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah dalam sektor Kesehatan dan Pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor produksi dalam hal ini penyediaan fasilitas Kesehatan dan Pendidikan. Ketersediaan fasilitas pada sektor Kesehatan dan Pendidikan akan meningkatkan produktivitas. Nurintasya, A. & Santoso, DB, (2023).

Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2014 hingga tahun 2023. Diketahui pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat variabel dummy. Penggunaan variabel *dummy* ini untuk mengetahui perbandingan atau perbedaan saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19 terjadi. Variabel *dummy* merupakan sebuah variabel nominal yang menggunakan kode 0 dan 1. Dalam penelitian ini kode 0 digunakan untuk tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan kode 1 untuk tahun setelah pandemi Covid-19.

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Untuk membuktikan tingkat kebenarannya, maka diperlukan untuk

pengujian secara empiris. Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (X1) berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
2. Diduga Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan (X2) berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
3. Diduga Belanja modal (X3) berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
4. Diduga PDRB sebagai variabel kontrol (X4) berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
5. Diduga Pengeluaran per Kapita sebagai variabel kontrol (X5) berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
6. Diduga Tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol (X6) berpengaruh negatif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
7. Diduga Tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol (X7) berpengaruh negatif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan
8. Diduga terdapat perbedaan Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) sebelum dan sesudah adanya covid-19 di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan